

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOJONEGORO

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

GeopArk
Bojonegoro

#BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO

082228911677

@satpolppbojonegoro

@satpolppbojonegoro

@satpolBjn



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. P. Mas Tumapel No. 1 Telepon (0353) 881826 Pswt 155
BOJONEGORO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 188/09 /KEP/412.208/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024;
- KEDUA : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 berdasarkan Surat Edaran Bupati Bojonegoro tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
- c. Menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024;
- d. Menyusun Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bojonegoro;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Sistematika Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 meliputi :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Perubahan Renja Tahun 2024

Bab IV. Penutup

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 7 Mei 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOJONEGORO


ARIEF NANANG SUGIANTO, S.STP, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19811121 200012 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 188/09 /KEP/412.208/2024
Tanggal : 7 Mei 2024

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024**

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam kedinasan
1.	Pengarah	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro
2.	Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan
4.	Anggota	a. Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah; b. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; c. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Satlinmas; d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; e. Kepala Sub Bagian Keuangan; f. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; g. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; h. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian; i. Kepala Seksi Kerjasama; j. Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur Satpol PP; k. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOJONEGORO



ARIEF NANANG SUGIANTO, S.STP, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19811121 200012 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro.

Perubahan Renja Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir Tahun 2024, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta perubahan anggaran 2024 pada Satpol PP Kabupaten Bojonegoro. Perubahan Renja dibuat hampir setiap tahun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 atau di Triwulan II 2024.

Perubahan Renja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian Perubahan Renja Satpol PP Kabupaten Bojonegoro merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Selanjutnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini di harapkan mampu menjadi panduan dan rambu pelaksanaan program dan kegiatan yang hendak dicapai di akhir Tahun Anggaran 2024 dalam upaya mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tujuan, sasaran dan target indikator program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharap masukan dan saran untuk perbaikan penyusunan di masa mendatang.

Semoga Perubahan Renja ini bermanfaat dan menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan untuk pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ke depan.

Bojonegoro, 8 Agustus 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOJONEGORO



ARIEF NANANG SUGIANTO, S.STP, MM.

Pembina Tingkat 1
NIP. 19811121 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4 Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja Perangkat Daerah	31
3.3 Program dan Kegiatan	33
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024	34
BAB V. PENUTUP	35
LAMPIRAN TABEL :	
Tabel 2.1. Formulir E.81. Evaluasi terhadap Hasil Renja PD Lingkup Kabupaten/Kota Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 (s.d. Triwulan II Tahun 2024)	
Tabel 2.2. T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro	
Tabel 2.3. T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024	
Tabel 2.4. T-C.31. Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro	
Tabel 2.5. T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro	
Tabel 3.1. T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro	
Tabel 3.2. Tabel Pagu Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2024 Tahapan RKPD Satpol PP Kabupaten Bojonegoro	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Perangkat Daerah (PD) termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 yang disingkat Perubahan Renja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk jangka waktu sisa Tahun 2024 yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, analisis kinerja, usulan program, kegiatan dan perubahan penganggarnya.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama Triwulan II Tahun 2024) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Tahun

2024 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Perubahan Renstra PD dan mengacu pada Perubahan RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu perubahan PD;
- c. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang sinkron dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu perubahan PD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 yang mengacu pada dokumen Perubahan Renstra PD dan Perubahan RKPD Tahun 2024;

2. Menjadi salah satu dokumen perencanaan yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mengacu pada dokumen Perubahan Renstra PD dan Perubahan RKPD Tahun 2024;
3. Melakukan sinkronisasi terhadap program – program yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dengan mengutamakan isu – isu strategis pada Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2024;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja melalui capaian target kinerja program dan kegiatan yang mengacu pada Perubahan Renstra PD dan Perubahan RKPD
5. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024

1.4. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2024

Memuat kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;*
- b. Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;*
- c. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;*

- d. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- e. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- f. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Perubahan RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- a. *Jumlah program dan jumlah kegiatan*
- b. *Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).*
- c. *Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.*

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

- a. *Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;*
- b. *Kaidah – kaidah pelaksanaan;*
- c. *Rencana Tindak Lanjut*

BAB 2

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro mengelola anggaran induk sebesar Rp. 31.570.997.847,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 2 program dan 9 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 17.780.593.288,- atau sebesar 56,32%.

Dari Pagu APBD Induk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebesar Rp. 31.570.997.847,-, Satpol PP Kabupaten Bojonegoro melakukan perubahan anggaran berupa selisih dari penambahan dan pengurangan dari beberapa kegiatan sebesar Rp. 1.382.330.477,- sehingga Pagu Perubahan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 30.188.667.370,-. Adapun pengurangan anggaran awalnya adalah sebesar Rp. 1.432.330.477,- yang bersumber dari Selisih Perhitungan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 1.167.130.477,- dan dari Dana DBH CHT pada Kegiatan Publikasi yang dialihkan ke Diskominfo Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 265.200.000,-, sedangkan untuk penambahan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- yang digunakan untuk tambahan belanja operasional Satpol PP pada kegiatan Kerjasama dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya untuk Pagu Perubahan APBD Tahun 2024 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro sebagaimana yang terinput dalam aplikasi sipd.kemendagri.go.id adalah sebesar Rp. 30.188.667.370,-. Pagu Perubahan APBD Tahun 2024 ini nantinya yang akan digunakan sebagai Pagu Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Kabupaten Bojonegoro sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Satpol PP Kabupaten Bojonegoro sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Formulir E.81 dan Tabel 2.2. T-C.29 sebagaimana terlampir.

- a. Dalam Formulir E.81, Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ditentukan Range Predikat Kinerja dan Keuangan sebagai berikut :

- 1.) ≤ 50 : Sangat Rendah
- 2.) ≤ 65 : Rendah
- 3.) ≤ 75 : Sedang
- 4.) ≤ 90 : Tinggi
- 5.) > 90 : Sangat Tinggi

Dari Tabel 2.1. Formulir E.81 sebagaimana terlampir dapat dilihat secara keseluruhan untuk serapan anggaran Satpol PP Kabupaten Bojonegoro sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 termasuk masih rendah yakni di 56,32%, tapi jika dibandingkan dengan target capaian anggaran yang ditetapkan sampai dengan Triwulan II (s.d. bulan Juni) Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 yaitu 40%, bisa dikatakan bahwa Satpol PP sudah melebihi target capaian anggaran yang telah ditetapkan yakni 56,32%.

- b. Dari penyerapan anggaran 56,32%, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang serapan anggarannya masih rendah dan kurang maksimal yaitu :
 1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dimana serapan anggarannya hanya sebesar 7,04%, dikarenakan jadwal kegiatan monev yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024 tidak bisa terlaksana sepenuhnya dan dilakukan penjadwalan ulang menyesuaikan agenda program/kegiatan prioritas pimpinan dan biaya operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan.
 2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan serapan anggarannya masih 0,00%, dikarenakan jadwal kegiatan sosialisasi yang direncanakan bulan Mei 2024 tidak bisa terlaksana dan dilakukan penjadwalan ulang menyesuaikan agenda program/kegiatan prioritas pimpinan.
 3. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dimana serapan anggarannya hanya sebesar 4,32%, dikarenakan jadwal kegiatan Rakor Opsar Pemberantasan yang direncanakan pada bulan Juni 2024 ditunda dan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 dan biaya operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Untuk Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024:
 1. **Tujuan** : Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 Indikator Tujuan : Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)
 Formulasi :
$$\sum_{i=1}^n \text{skor dimensi (i)} \times \text{bobot dimensi (i)}$$

 Target Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 = 76.50

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) merupakan salah satu Indeks Komposit dari Indeks Rasa Aman yang pengukuran dan perhitungannya dilakukan oleh Pihak Konsultan Bidang Litbang Bappeda. Adapun data yang digunakan untuk perhitungan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 adalah Data Tahun 2023 karena Tahun 2024 belum berakhir.

Realisasi Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 direncanakan baru akan diukur pada bulan Agustus 2024.

2. Sasaran :

1) Meningkatnya efektifitas pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum

Indikator Sasaran: Tingkat efektifitas pengendalian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah potensi pelanggaran yang berhasil dicegah atau tidak terjadi}}{\text{Jumlah potensi pelanggaran yang teridentifikasi}} \times 100\%$$

Target Tahun 2024 = 95.30%

Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024 = $\frac{58}{64} \times 100\% = 90.625\%$

Penjelasan : 58 merupakan akumulasi titik potensi pelanggaran yang berhasil dicegah/tidak terjadi pelanggaran (TTP) Tahun 2024 yang berasal dari TTP titik patroli rutin (40) dan TTP dari titik di luar titik patrol rutin (18), sedangkan 64 merupakan akumulasi semua titik potensi pelanggaran Tahun 2024 yang berasal dari titik patrol rutin (46) dan titik di luar titik patroli rutin (18).

2) Meningkatnya efektifitas penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Indikator Sasaran:

1. Persentase penanganan gangguan trantibum yang tidak berulang

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah titik pelanggaran trantibum yang terselesaikan di Tahun (n-1) yang tidak terulang di Tahun (n)}}{\text{Jumlah titik pelanggaran trantibum yang terselesaikan di Tahun (n-1)}} \times 100\%$$

Target Tahun 2024 = 80%

Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024 = $\frac{60}{64} \times 100\% = 93.75\%$

Penjelasan : 60 merupakan akumulasi titik pelanggaran trantibum yang terselesaikan di Tahun 2023 (n-1) yang tidak terulang pelanggarannya di

Tahun 2024 (n), yang berasal dari titik patroli rutin (42) dan dari titik di luar titik patroli rutin (18), sedangkan 64 merupakan akumulasi semua titik pelanggaran trantibum yang terselesaikan di Tahun 2023 (n-1) yang berasal dari titik patroli rutin (46) dan titik di luar titik patrol rutin (18).

2. Persentase penurunan jumlah pelanggaran trantibum

Formulasi : $\frac{\text{Jumlah titik pelanggaran trantibum yang turun angka pelanggarannya di Tahun (n) dibandingkan dengan Tahun lalu (n-1)}}{\text{Jumlah keseluruhan titik pelanggaran trantibum di Tahun (n)}} \times 100\%$

Target Tahun 2024 = 78%

Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024 = $\frac{55}{64} \times 100\% = 85.94\%$

3. Persentase penyelesaian gangguan trantibum

Formulasi : $\frac{\text{Jumlah pelanggaran trantibum yang diselesaikan di Tahun (n)}}{\text{Jumlah pelanggaran trantibum yang ditemukan/dilaporkan di Tahun (n)}} \times 100\%$

Target Tahun 2024 = 95.30%

Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024 = $\frac{1.027}{1.032} \times 100\% = 99.52\%$

3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

Indikator Sasaran dan Formulasi :

1. Nilai SAKIP PD

Formulasi : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat

- Target SAKIP Satpol PP Tahun 2024 = 85.10

Evaluasi SAKIP Satpol PP Tahun 2024, pengukuran dan perhitungannya dilakukan melalui Input Data Sakip pada Aplikasi Perisai Inspektorat. Adapun Data Evaluasi SAKIP yang digunakan adalah Data Evaluasi Tahun 2023 dan Perencanaan serta Perbaikan Tahun 2024.

- Realisasi SAKIP Satpol PP Tahun 2024 belum ada karena LHE SAKIP dari Inspektorat belum terbit.

2. Nilai IKM PD

Formulasi : $\frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$

- Target IKM Satpol PP Tahun 2024 = 3.55

- Realisasi Nilai IKM Satpol PP Tahun 2024 akan diukur dan dihitung oleh pihak konsultan dan direncanakan akan dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.

3. Persentase Penyerapan Anggaran Satpol PP

$$\text{Formulasi : } \frac{\text{Realisasi Penyerapan Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

- Target Persentase Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 40%

- Realisasi Persentase Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2024

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. 17.780.193.288,-} \\ &\frac{\text{Rp. 31.570.997.847}}{\text{Rp. 31.570.997.847}} \times 100\% \\ &= 56.32\% \end{aligned}$$

Realisasi Persentase Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2024 sudah melebihi Target, yakni di atas 40%, tepatnya 56.32%

- d. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada *Tabel 2.2. T-C.29* sebagaimana terlampir.

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Program :

- (1) Persentase patroli rutin terjadwal

Target Tahun 2024 = 100%

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 49.73%

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 49.73% dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebesar 49.73%, terealisasi sebesar 100%.

- (2) Persentase patroli insidentil pencegahan pelanggaran trantibum di luar titik patroli rutin

Target Tahun 2024 = 100%

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 57.69%

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 57.69% dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebesar 57.69%, terealisasi sebesar 100%.

- (3) Persentase kegiatan deteksi dini dan cegah dini

Target Tahun 2024 = 100%

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 49.73%

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 49.73% dari target s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebesar 49.73%, terealisasi sebesar 100%.

(4) Persentase penanganan gangguan trantibum

Target Tahun 2024 = 100%

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 100%

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%.

Aduan gangguan trantibum yang masuk lewat WA Aduan maupun yang dilaporkan oleh masyarakat serta pelanggaran trantibum yang ditemukan saat patrol rutin maupun insidentil segera ditindaklanjuti oleh Satpol PP.

Persentase penanganan gangguan trantibum merupakan indikator yang realisasinya bersifat absolut bukan akumulatif sehingga nanti capaian realisasi yang dilihat adalah capaian realisasi pada akhir tahun.

(5) Persentase penegakan perda/perkada

Target Tahun 2024 = 100%

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 100%

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%.

Kegiatan penegakan Perda/Perkada dilakukan melalui sosialisasi Perda/Perkada kepada masyarakat, penanganan dan penindakan langsung kepada pelanggar Perda/Perkada.

Persentase penegakan Perda/Perkada merupakan indikator yang realisasinya bersifat absolut bukan akumulatif sehingga nanti capaian realisasi yang dilihat adalah capaian realisasi pada akhir tahun.

(6) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Target Tahun 2024 = 1.73

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 1.73

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 1.72 dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebesar 1.73, terealisasi sebesar 99.42%.

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk merupakan indikator yang realisasinya bersifat absolut bukan akumulatif sehingga nanti capaian realisasi yang dilihat adalah capaian realisasi pada akhir tahun.

(7) Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Target Tahun 2024 = 103.74

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 103.74

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 103.74 dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebesar 103.74, terealisasi sebesar 100%.

Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk merupakan indikator yang realisasinya bersifat absolut bukan akumulatif sehingga nanti capaian realisasi yang dilihat adalah capaian realisasi pada akhir tahun.

Pada Program ini terdapat 3 (tiga) Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan :

(1) Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar dan pembinaan penyelenggaraan trantibum

Target Tahun 2024 = 45 orang anggota Satpol PP

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 24 orang anggota Satpol PP

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 24 orang anggota Satpol PP dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 24 orang anggota Satpol PP, terealisasi sebesar 100%.

Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar dan Pembinaan Penyelenggaraan Trantibum merupakan indikator yang realisasinya bersifat absolut bukan akumulatif sehingga nanti capaian realisasi yang dilihat adalah capaian realisasi pada akhir tahun.

(2) Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti kegiatan pemberdayaan terkait trantibum

Target Tahun 2024 = 585 orang anggota Satlinmas

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 62 orang anggota Satlinmas

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 62 orang anggota Satlinmas dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 62 orang anggota Satlinmas, terealisasi sebesar 100%.

(3) Jumlah lembaga mitra kerjasama Satpol PP

Target Tahun 2024 = 14 lembaga

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 8 lembaga

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 8 lembaga dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 8 lembaga, terealisasi sebesar 100%.

(4) Jumlah patroli rutin terjadwal

Target Tahun 2024 = 1.098 kali patroli rutin

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 546 kali patrol rutin

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 546 kali patroli rutin dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 546 kali patrol rutin, terealisasi sebesar 100%.

(5) Jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini

Target Tahun 2024 = 366 kali deteksi dini dan cegah dini

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 182 kali deteksi dini dan cegah dini

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 182 kali deteksi dini dan cegah dini dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 182 kali deteksi dini dan cegah dini, terealisasi sebesar 100%.

(6) Jumlah penanganan gangguan trantibum

Target Tahun 2024 = 4.300 penanganan gangguan/pelanggaran trantibum

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 1.900 penanganan gangguan/pelanggaran trantibum

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 1.032 penanganan gangguan/pelanggaran trantibum dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 1.900 penanganan gangguan/pelanggaran trantibum, terealisasi sebesar 54.32%.

Penanganan gangguan/pelanggaran trantibum s.d. Triwulan II Tahun 2024 memang sekilas terlihat rendah/lebih sedikit dibandingkan targetnya, namun hal ini juga mengindikasikan bahwa gangguan/pelanggaran trantibum yang ditemukan/dilaporkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 lebih sedikit jumlahnya, yang dapat diartikan situasi ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat lebih kondusif. Aduan gangguan/pelanggaran trantibum yang masuk lewat WA Aduan maupun yang dilaporkan oleh masyarakat serta pelanggaran trantibum yang ditemukan saat patrol rutin maupun insidentil segera ditindaklanjuti oleh Satpol PP.

(7) Jumlah penyelesaian gangguan trantibum

Target Tahun 2024 = 4.000 penyelesaian gangguan/pelanggaran trantibum

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 2.000 penyelesaian gangguan/pelanggaran trantibum

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 1.032 penyelesaian gangguan/pelanggaran trantibum dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 2.000 penyelesaian gangguan/pelanggaran trantibum, terealisasi sebesar 51.60%.

Penyelesaian gangguan/pelanggaran trantibum s.d. Triwulan II Tahun 2024 memang sekilas terlihat rendah/lebih sedikit dibandingkan targetnya, namun hal ini juga mengindikasikan bahwa gangguan/pelanggaran trantibum yang ditemukan/dilaporkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 lebih sedikit jumlahnya, yang dapat diartikan situasi ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat lebih kondusif.

Aduan gangguan/pelanggaran trantibum yang masuk lewat WA Aduan maupun yang dilaporkan oleh masyarakat serta pelanggaran trantibum yang ditemukan saat patrol rutin maupun insidentil segera ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Satpol PP.

- (8) Jumlah sarana dan prasarana trantibum minimal yang dipenuhi

Target Tahun 2024 = 134 unit

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 110 unit

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 110 unit dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 134 unit, terealisasi sebesar 82.09%.

2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali kota

Indikator Kegiatan :

- (1) Jumlah sosialisasi perda/perkada yang dilakukan

Target Tahun 2024 = 8 kali sosialisasi perda/perkada

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 2 kali sosialisasi perda/perkada

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 1 kali sosialisasi perda/perkada dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 2 kali sosialisasi perda/perkada, terealisasi sebesar 50%.

Sosialisasi perda/perkada terkait cukai ilegal baru dilaksanakan 1 kali pada bulan Juni 2024.

- (2) Jumlah perda/perkada yang ditegakkan

Target Tahun 2024 = 30 buah perda/perkada

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 30 buah perda/perkada

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 30 buah perda/perkada yang ditegakkan dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 30 buah perda/perkada, terealisasi sebesar 100%.

Jumlah perda/perkada yang ditegakkan merupakan indikator yang realisasinya bersifat absolut bukan akumulatif sehingga nanti capaian realisasi yang dilihat adalah capaian realisasi pada akhir tahun.

- (3) Jumlah kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap perda/perkada yang dilakukan

Target Tahun 2024 = 12 kali kegiatan pengawasan

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 6 kali kegiatan pengawasan

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 6 kali kegiatan pengawasan dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 6 kali kegiatan pengawasan, terealisasi sebesar 100%.

3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan : Jumlah PPNS yang dikembangkan kapasitasnya

Target Tahun 2024 = 12 orang PPNS

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 11 orang PPNS

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 11 orang PPNS dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 12 orang PPNS, terealisasi sebesar 91.67%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program : Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah

Target Tahun 2024 = 100%

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 75%

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 75% dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebesar 75%, terealisasi sebesar 100%.

Pada Program ini terdapat 6 (enam) Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi.

Target Tahun 2024 = 20 dokumen

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 10 dokumen

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 12 dokumen dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 10 dokumen, terealisasi sebesar 120%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu.

Target Tahun 2024 = 12 laporan

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 6 laporan

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 6 laporan dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 6 laporan, terealisasi sebesar 100%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun tepat waktu.

Target Tahun 2024 = 12 laporan

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 6 laporan

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 6 laporan dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 6 laporan, terealisasi sebesar 100%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang disusun tepat waktu.

Target Tahun 2024 = 12 laporan

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 6 laporan

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 6 laporan dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 6 laporan, terealisasi sebesar 100%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan : Jumlah jenis jasa penunjang pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu.

Target Tahun 2024 = 2 jenis jasa penunjang

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 2 jenis jasa penunjang

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 2 jenis jasa penunjang dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 2 jenis jasa penunjang, terealisasi sebesar 100%.

2 (dua) jenis jasa penunjang berupa jasa komunikasi kantor dan jasa pelayanan umum kantor yang telah disediakan setiap bulannya.

Jumlah jenis jasa penunjang merupakan indikator yang realisasinya bersifat absolut bukan akumulatif sehingga nanti capaian realisasi yang dilihat adalah capaian realisasi pada akhir tahun.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Indikator Kegiatan : Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah yang disediakan tepat waktu.

Target Tahun 2024 = 2 jenis pemeliharaan BMD

Target s.d. Triwulan II Tahun 2024 = 2 jenis pemeliharaan BMD

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 2 jenis pemeliharaan BMD dari target yang ditetapkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 2 jenis pemeliharaan BMD, terealisasi sebesar 100%.

2 (dua) jenis pemeliharaan barang milik daerah (BMD) berupa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas operasional dan peralatan dan mesin kantor yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisinya.

Jumlah jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan indikator yang realisasinya bersifat absolut bukan akumulatif sehingga nanti capaian realisasi yang dilihat adalah capaian realisasi pada akhir tahun.

Dari Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro s.d. Triwulan II Tahun 2024 di atas, Indikator Kinerja yang capaiannya belum maksimal adalah Jumlah sosialisasi perda/perkada yang hanya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali sosialisasi perda/perkada terkait cukai ilegal, yang awalnya ditargetkan s.d. Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali sosialisasi. Hal ini karena berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan Satpol PP lainnya sehingga sosialisasi perda/perkada dijadwalkan ulang dan menyesuaikan dengan agenda program/kegiatan prioritas pimpinan. Adapun untuk Jumlah penanganan dan penyelesaian trantibum yang capaian kinerjanya masih rendah dari yang ditargetkan tidak menjadi masalah karena memang jumlah gangguan/pelanggaran trantibum bersifat fluktuatif, insidentil dan banyak faktor yang mempengaruhinya.

**Perbandingan Rekapitulasi Jenis Gangguan/Pelanggaran Trantibum
di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 dan s.d. Triwulan II Tahun 2024**

NO.	JENIS PELANGGARAN	Tahun 2023 dan s.d. TW II Tahun 2024					
		Jumlah gangguan/ pelanggaran trantibum yang dilaporkan/ dipantau/ ditemukan		Jumlah gangguan/ pelanggaran trantibum yang ditangani		Jumlah gangguan/ pelanggaran trantibum yang diselesaikan	
		2023	s.d. TW II 2024	2023	s.d. TW II 2024	2023	s.d. TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Asusila/ Prostitusi Liar	0	6	0	6	0	6
2.	Ijin Hiburan/ Karaoke	0	1	0	1	0	1
3.	Makanan dan Minuman Kadaluarsa	0	0	0	0	0	0
4.	Operasi Sayang	30	8	30	8	30	8
5.	Pertambangan	3	5	3	5	0	0
6.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	4.284	732	4.118	732	4.021	732
7.	Bangunan Liar	16	0	16	0	16	0
8.	Pemasangan Reklame/ Spanduk	1.090	195	1.090	195	1.090	195
9.	Disiplin PNS	0	0	0	0	0	0
10.	Tower	0	32	0	32	0	32
11.	Persetujuan Bangunan Gedung	0	2	0	2	0	2
12.	Anak Jalanan/ PMKS	61	31	61	31	61	31
13.	Minuman Beralkohol	0	0	0	0	0	0
14.	ODGJ	10	16	10	16	10	16
15.	Aset Daerah	0	0	0	0	0	0
16.	Pro Yustisi/ Tipiring	0	4	0	4	0	4
JUMLAH :		5.494	1.032	5.328	1.032	5.228	1.027

Sumber : Data Rekapitulasi Pelanggaran Trantibum Satpol PP Kabupaten Bojonegoro (diolah)

Titik Lokasi Pencegahan Pelanggaran Trantibum
(Khusus Bangunan Liar, Asusila/ Prostitusi, Izin Hiburan/ Karaoke, Minuman Beralkohol,
Makanan Minuman Kadaluausa dan Operasi Sayang)
di Kabupaten Bojonegoro s.d. Triwulan II Tahun 2024

No.	Titik Lokasi	Efektifitas Pencegahan Pelanggaran Tahun 2022, Tahun 2023 dan s.d. Triwulan II 2024 (Per Titik Lokasi)						Keterangan (Jenis Pelanggaran)
		2022		2023		s.d. TW II 2024		
		TP	TTP	TP	TTP	TP	TTP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TITIK LOKASI PATROLI								
1.	Jl. P. Mastumapel		1		1		1	
2.	Jl. Imam Bonjol	1		1		1		Asusila/ Prostitusi, Operasi Sayang
3.	Jl. Hasyim Ashari		1		1		1	
4.	Jl. Pahlawan		1		1		1	
5.	Jl. Mastrip		1		1		1	
6.	Jl. MH. Thamrin	1			1		1	Operasi Sayang
7.	Jl. Rajekwesi	1		1			1	Operasi Sayang
8.	Jl. Pattimura		1		1		1	
9.	Jl. Panglima Polim	1		1		1		Operasi Sayang
10.	Jl. Untung Suropati	1			1		1	Asusila/ Prostitusi
11.	Jl. Diponegoro		1		1		1	
12.	Jl. Teuku Umar		1		1		1	
13.	Jl. Pemuda		1		1		1	
14.	Jl. Lettu Suwolo		1		1		1	
15.	Jl. Jaksa Agung Suprpto		1	1			1	Bangunan Liar
16.	Jl. KH. Mansyur		1	1			1	Bangunan Liar
17.	Jl. Hartono		1		1		1	
18.	Jl. Hasanuddin		1		1		1	
19.	Jl. Panglima Sudirman		1		1		1	
20.	Jl. Trunojoyo Selatan		1		1		1	
21.	Jl. Veteran		1	1		1		Bangli, Karaoke

No.	Titik Lokasi	Efektifitas Pencegahan Pelanggaran Tahun 2022, Tahun 2023 dan s.d. Triwulan II 2024 (Per Titik Lokasi)						Keterangan (Jenis Pelanggaran)
		2022		2023		s.d.TW II 2024		
		TP	TTP	TP	TTP	TP	TTP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22.	Jl. Ahmad Yani		1		1		1	
23.	Jl. Gajahmada		1		1		1	
24.	Jl. Serma Abdullah		1		1		1	
25.	Jl. Hos Cokroaminoto		1		1		1	
26.	Jl. Dr. Sutomo		1		1		1	
27.	Jl. Arif Rahman Hakim		1		1		1	
28.	Jl. Munginsidi		1		1		1	
29.	Jl. Basuki Rahmat		1		1	1		Asusila/Prostitusi
30.	Jl. Sawunggaling		1		1		1	
31.	Jl. AKBP. M.Suroko		1		1		1	
32.	Jl. Trunojoyo Utara		1		1		1	
33.	Jl. Hayam Wuruk	1			1		1	Bangunan Liar
34.	Jl. Wr. Supratman		1		1		1	
35.	Jl. Lettu Suyitno		1		1		1	
36.	Jl. Mangga		1		1		1	
37.	Jl. Dr. Cipto		1		1		1	
38.	Jl. Dr. Wahidin	1			1		1	Operasi Sayang
39.	Jl. Rajawali		1		1		1	
40.	Jl. Setyo Budi		1		1		1	
41.	Jl. Lisman	1			1		1	Asusila/ Prostitusi
42.	Jl. TGP		1		1		1	
43.	Jl. Serma Maun		1		1	1		Operasi Sayang
44.	Jl. Serma Dasri		1		1		1	
45.	Jl. Pondok Pinang	1		1		1		Asusila/ Prostitusi, Operasi Sayang
46.	Jl. Kartini		1		1		1	
JUMLAH :		9	37	7	39	6	40	

Sumber : Data Rekapitulasi Titik Pelanggaran Trantibum Satpol PP Kabupaten Bojonegoro (diolah)

Titik Lokasi Pencegahan Pelanggaran Trantibum
(Khusus Bangunan Liar, Asusila/ Prostitusi, Izin Hiburan/ Karaoke, Minuman Beralkohol,
Makanan Minuman Kadaluarsa dan Operasi Sayang)
di Kabupaten Bojonegoro s.d. Triwulan II Tahun 2024

No.	Titik Lokasi	Efektifitas Pencegahan Pelanggaran Tahun 2022, Tahun 2023 dan s.d. Triwulan II 2024 (Per Titik Lokasi)						Keterangan (Jenis Pelanggaran)
		2022		2023		s.d.TW II 2024		
		TP	TTP	TP	TTP	TP	TTP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TITIK LOKASI LAINNYA DI LUAR TITIK PATROLI								
1.	Desa Ngulanan Kecamatan Dander	1			1		1	Bangunan Liar
2.	Desa Leran Kecamatan Kalitidu	1			1		1	Bangunan Liar
3.	Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu	1			1		1	Bangunan Liar
4.	Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu	1			1		1	Bangunan Liar, Izin Hiburan/Karaoke
5.	Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu	1			1		1	Bangunan Liar
6.	Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu	1			1		1	Bangunan Liar
7.	Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu	1			1		1	Bangunan Liar
8.	Desa Sidobandung Kecamatan Balen	1			1		1	Bangunan Liar
9.	Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo	1			1		1	Bangunan Liar
10.	Desa Tinggang Kecamatan Padangan	1			1		1	Asusila/ Prostitusi, Izin Hiburan/Karaoke
11.	Pasar Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras	1			1		1	Makanan Minuman Kadaluarsa

No.	Titik Lokasi	Efektifitas Pencegahan Pelanggaran Tahun 2022, Tahun 2023 dan s.d. Triwulan II 2024 (Per Titik Lokasi)						Keterangan (Jenis Pelanggaran)
		2022		2023		s.d.TW II 2024		
		TP	TTP	TP	TTP	TP	TTP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12.	Desa Mojanu Kecamatan Dander	1			1		1	Izin Hiburan/ Karaoke
13.	Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo	1			1		1	Izin Hiburan/ Karaoke
14.	Desa Pajeng Kecamatan Gondang	1			1		1	Minuman Beralkohol
15.	Desa Sidobandung Kecamatan Balen	1			1		1	Minuman Beralkohol
16.	Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk			1			1	Asusila/Prostitusi
17.	Desa Bangilan Kecamatan Kapas			1			1	Bangunan Liar
18.	Kecamatan Kasiman			1			1	Bangunan Liar
JUMLAH :		15	0	3	15	0	18	

Sumber : Data Rekapitulasi Titik Pelanggaran Trantibum Satpol PP Kabupaten Bojonegoro (diolah)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan PD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra PD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro sebagaimana Tabel 2.3. T-C.30 terlampir.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Masih tingginya pelanggaran ketertiban dan keamanan, dengan akar permasalahan sebagai berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
Pelanggaran Peraturan Daerah masih sering terjadi	Masih sering terjadi pelanggaran trantibum	Lemahnya kesadaran hukum masyarakat terkait peraturan yang berlaku	Jumlah pelanggaran trantibum
		Sosialisasi penegakan Perda/Perkada terkait trantibum belum optimal	Persentase kegiatan sosialisasi penegakan Perda/Perkada
		Penyelesaian dan pemberian efek jera kepada pelanggar trantibum belum optimal	Jumlah laporan TL terhadap pelanggar Trantibum
		Kurangnya sarana dan prasarana yang berkualitas dalam menunjang pra dan paska penanganan/pemantauan trantibum	Jumlah sarana dan prasarana penunjang penanganan/pemantauan trantibum
		Kurangnya koordinasi, dukungan serta rencana terpadu dalam penegakan Perda/Perkada dengan dinas/instansi terkait	Jumlah Berita Acara/MoU/SK kerjasama dengan dinas/instansi terkait
		Dukungan pemberdayaan, pembinaan dan solusi terhadap keberadaan pelanggar trantibum terutama PMKS belum optimal	- Jumlah pelatihan dan modal kerja untuk PMKS (selain ODGJ) - Jumlah laporan TL orang tidak dikenal (ODGJ)
	Pemberdayaan anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam penanganan gangguan trantibum belum optimal	Kualitas dan kapasitas SDM anggota Satpol PP dan Satlinmas masih banyak yang belum memenuhi standar pelayanan (rerata usia, standar pendidikan dan kompetensi pelatihan yang belum memadai)	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklat dasar/ pelatihan penyelenggaraan trantibum
			Jumlah anggota Satlinmas yang mahir/mengikuti kegiatan pemberdayaan
	Kualitas penyidikan gangguan trantibum belum optimal	Sarana dan prasarana pendukung penyidikan belum memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung penyidikan

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan anggaran sebesar Rp. 30.188.667.370 (Tiga Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan analisis kebutuhan anggaran sebagaimana Tabel 2.4. T-C.31 terlampir.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan forum konsultasi publik Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro, akademisi, masyarakat pilihan (Paguyuban Pedagang Kaki Lima, Organisasi Masyarakat/LSM, DPRD) tidak ada usulan/masukan maupun rekomendasi untuk menjadi program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana Tabel 2.5. T-C.32 terlampir.

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam rangka mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan semakin dirasakan perlu meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, tenteram dan teratur.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bentuk antisipasi perkembangan dan dinamika yang ada di masyarakat seiring dengan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat, sehingga perlu dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024, meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikatornya adalah jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik” dan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM tersebut.

Sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yaitu Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah, maka diperlukan kondisi :

1. Kepastian dan Penegakan Hukum;
2. Keamanan dan Ketertiban;
3. Konsolidasi Demokrasi;
4. Reformasi Birokrasi, dan
5. Reformasi Regulasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro; Satpol PP Kabupaten Bojonegoro memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

a. Kedudukan

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Pengawasan serta Perlindungan Masyarakat.

c. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

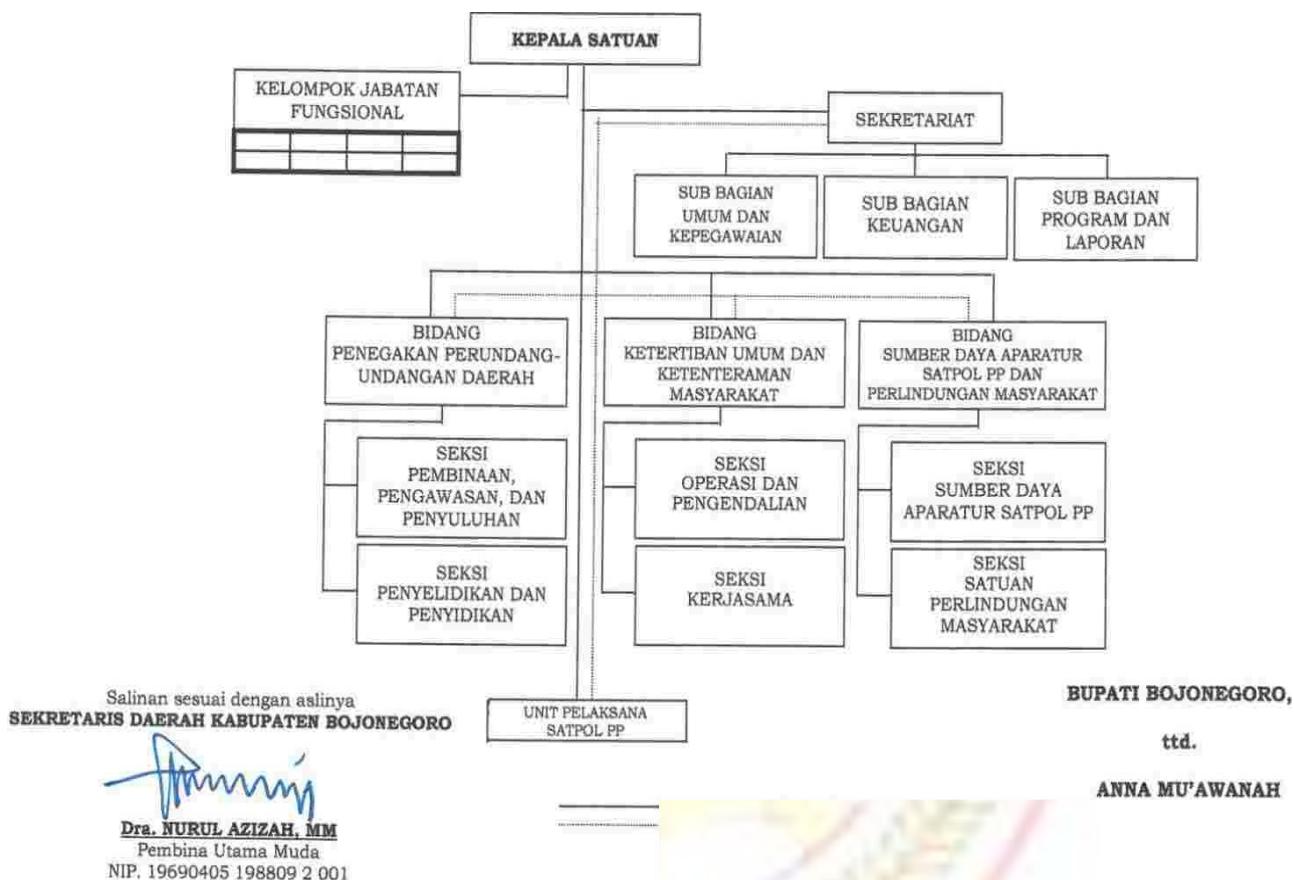
Dalam melaksanakan tugas pokok Satpol PP mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, ppns daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinyaperumusan kebijakan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A yang terdiri dari :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program dan Laporan
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian
 2. Seksi Kerja Sama
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Linmas, membawahi :
 1. Seksi Satlinmas
 2. Seksi Sumber Daya Aparatur

- f. Unit Pelaksana Satpol PP
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- dengan struktur organisasi sebagai berikut :



3.2. Tujuan Dan Sasaran Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja selama kurun waktu jangka tiga tahun yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan

Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Tujuan 1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, yaitu :

Tujuan 1 RPD : “Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib”.

Dalam rangka pencapaian Tujuan 1 RPD tersebut maka ditetapkan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

Tujuan Satpol PP : “Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”.

Untuk mengukur pelaksanaan Tujuan Satpol tersebut maka ditetapkan **Indikator Tujuan Satpol PP** adalah **Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)**.

2. Sasaran

Kesesuaian penjabaran Tujuan Satpol PP dalam mencapai Tujuan 1 RPD dapat menentukan efektifitas pelaksanaan pelayanan Satpol PP, penyelesaian gangguan trantibum serta akuntabilitas kinerja Satpol PP, sehingga dirumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikatornya sebagaimana tabel berikut :

NO.	TUJUAN 1 RPD	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET P-2024
1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib	Tujuan : Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Nilai	76.50
		Sasaran 1: Meningkatnya efektifitas pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum	Tingkat efektifitas pengendalian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum	%	95.30
		Sasaran 2: Meningkatnya efektifitas penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Persentase penanganan gangguan trantibum yang tidak berulang	%	80.00
			2. Persentase penurunan jumlah pelanggaran trantibum	%	78.00
			3. Persentase penyelesaian gangguan trantibum	%	95.30

NO.	TUJUAN 1 RPD	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET P-2024
1.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib	Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD (Satpol PP)	Nilai	85.10
			Nilai IKM PD (Satpol PP)	Nilai	3.55
			Persentase Penyerapan Anggaran Satpol PP	%	94.51

3.3. Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target pada Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

No.	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah	Lokasi	Pendanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Kabupaten Bojonegoro	Rp.30.188.667.370,-
	Jumlah Program	2		
	Jumlah Kegiatan	9		
	Jumlah Sub Kegiatan	30		

Rumusan Program dan Kegiatan sudah sesuai dengan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.4. T-C.31 terlampir dan untuk rincian sumber pendanaannya sebagaimana Tabel 3.1. T-C.33 terlampir.

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan Tahun 2024 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Perangkat Daerah pelaksana program, P-RKPD Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam P-APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan P-RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Perangkat Daerah. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Rencana Kerja dan Pendanaan PD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro pada Perubahan Renja Tahun 2024 dirinci sebagaimana pada Tabel 3.1. T-C.33 terlampir.

BAB 5

PENUTUP

Dasar Penyusunan Perubahan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Perangkat Daerah (PD) termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan bulan Juni Triwulan II (Semester I) Tahun 2024 yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Adapun perubahan indikator kinerja dan target capaian beserta satuannya seperti yang tertera pada Tabel T-C.33 merupakan bagian dari tindak lanjut perbaikan untuk menyesuaikan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan dengan aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

A. CATATAN PENTING

Dokumen Perubahan Renja ini disusun dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2024. Kebutuhan pendanaan yang telah dikompilasikan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 202400 disusun dengan memperhatikan antara lain :

1. Kebutuhan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara maksimal;
2. Kebutuhan pendanaan digunakan untuk kegiatan lanjutan dan kegiatan penyempurnaan dari hasil evaluasi sampai dengan bulan Juni Triwulan II (Semester I) Tahun 2024;
3. Kebutuhan pendanaan dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024.

B. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2024 wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro. Dalam mengimplementasikan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun program kerja Perangkat Daerah, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro, Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini merupakan gambaran dalam menyusun perubahan kebijakan, baik yang berupa kerangka regulasi maupun perubahan kerangka anggaran dalam penyusunan RKPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program kegiatan di kecamatan.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Pada akhir Tahun Anggaran 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian Tujuan Satpol PP, pencapaian sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan lainnya yang terkait.

Demikian Dokumen Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2024.

Bojonegoro, 8 Agustus 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOJONEGORO



ARIEF NANANG SUGIANTO, S.STP, MM.

Pembina Tingkat 1

NP. 19811121 200012 1 00

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota

Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro

Periode Pelaksanaan Triwulan 2 Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
1	2	3				4	5		6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18			
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			SATPOLPP				
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			SATPOLPP				
	Tujuan : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat																										SATPOLPP		
								Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (IKKU)	%	0.93			0.91		0.13		0.14					0.14		15.38 %		0.14		15.05 %	
Sasaran : Meningkatnya efektifitas pencegahan pelanggaran dan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum																											SATPOLPP		
								Tingkat efektifitas pengendalian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	96			95.3		50		79					79		82.90 %		79		82.29 %	
Sasaran : Meningkatnya penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum																												SATPOLPP	
								Persentase Penyelesaian gangguan trantibum	%	96			95.3		16		50					50		52.47 %		50		52.08 %	
1		1 05 02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						50,605,673,178			21,932,433,753		4,691,687,393		8,999,663,921					13,691,351,314		62.43 %		13,691,351,314		27.05 %	SATPOLPP
								Persentase Perda/Perkada yang ditegakan	%	100			100		100		100					100		100 %		100		100 %	
								Persentase Penanganan aduan gangguan trantibum	%	100			100		100		100					100		100 %		100		100 %	
								Persentase anggota satlinmas yang mahir	%	38			36		3		3					3		8.33 %		3		7.89 %	
								Persentase anggota satpol PP yang mengikuti diklat dasar dan pembinaan penyelenggaraan trantibum	%	100			100																
		1 05 02 2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						44,114,896,988			19,998,016,498		4,662,552,093		8,746,914,920					13,409,467,013		67.05 %		13,409,467,013		30.40 %	SATPOLPP
								Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	orang	1340			430		341		33					374		86.98 %		374		27.91 %	
								Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklat dasar dan pembinaan	orang	240			236		189		33					222		94.07 %		222		92.50 %	
								Jumlah aduan gangguan trantibum yang ditangani	aduan	13200			4300		1389		1887					3276		76.19 %		3276		24.82 %	
								Jumlah lembaga mitra kerjasama Satpol PP	lembaga	15			14		6		7					13		92.86 %		13		86.67 %	
		1 05 02 2.01 0003		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						113,205,500			42,241,500		17,059,500							17,059,500		40.39 %		17,059,500		15.07 %	SATPOLPP
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12			4		1		1					2		50.00 %		2		16.67 %	
		1 05 02 2.01 0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						9,196,454,200			5,106,174,200		1,994,529,000		52,646,550					2,047,175,550		40.09 %		2,047,175,550		22.26 %	SATPOLPP

No	Tujuan / Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV										
										7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
1	2	3					4	5		6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18	
								Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		15			5		1		2					3		60.00 %		3		20.00 %			
		1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					488,471,250			170,975,350		29,352,900		62,073,400					91,426,300		53.47 %		91,426,300		18.72 %	SATPOLPP	
								Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		1340			430		127		75					202		46.98 %		202		15.07 %			
		1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum					17,948,792,000			8,678,592,000		1,803,764,000		6,746,209,000					8,549,973,000		98.52 %		8,549,973,000		47.64 %	SATPOLPP	
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen		72			24		6		7					13		54.17 %		13		18.06 %			
		1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					1,274,339,650			711,838,700		65,430,500		174,807,600					240,238,100		33.75 %		240,238,100		18.85 %	SATPOLPP	
								Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan		36			12		1		5					6		50.00 %		6		16.67 %			
		1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					15,026,396,388			5,262,352,748		748,931,193		1,711,010,970					2,459,942,163		46.75 %		2,459,942,163		16.37 %	SATPOLPP	
								Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan		36			12		1		6					7		58.33 %		7		19.44 %			
		1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentrman dan Ketertiban Umum					67,238,000			25,842,000		3,485,000		167,400					3,652,400		14.13 %		3,652,400		5.43 %	SATPOLPP	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit		194			134		1		1					2		1.49 %		2		1.03 %			
		1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					6,464,723,190			1,919,964,255		29,135,300		247,575,601					276,710,901		14.41 %		276,710,901		4.28 %	SATPOLPP	
								Jumlah kegiatan penegakan perda Kabupaten/Kota dan Peraturan	kali		14			14		6		6					12		85.71 %		12		85.71 %			
								Jumlah perda/perkada yang ditegakkan	buah		50			48		8		8					16		33.33 %		16		32.00 %			
		1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					3,519,506,475			1,107,369,250		6,610,800		219,425,950					226,036,750		20.41 %		226,036,750		6.42 %	SATPOLPP	
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		15			5		1		2					3		60.00 %		3		20.00 %			
		1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					2,857,019,715			783,196,005		10,000,000		23,565,200					33,565,200		4.29 %		33,565,200		1.17 %	SATPOLPP	

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1	2	3				4	5		6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	36			12		1		3				4		33.33 %		4		11.11 %				
		1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					88,197,000			29,399,000		12,524,500		4,584,451					17,108,951		58.20 %		17,108,951		19.40 %	SATPOLPP
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	108			36		9		5				14		38.89 %		14		12.96 %				
		1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					26,053,000			14,453,000			5,173,400					5,173,400		35.79 %		5,173,400		19.86 %	SATPOLPP	
								Jumlah PPNS yang dikembangkan kapasitasnya	orang	16			16			1					1		6.25 %		1		6.25 %				
		1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					26,053,000			14,453,000			5,173,400					5,173,400		35.79 %		5,173,400		19.86 %	SATPOLPP	
								Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	3			1			1					1		100 %		1		33.33 %				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																								57.14 %	62.43 %			30.01 %	27.05 %	SATPOLPP	
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																								Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	SATPOLPP	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM																															
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM																															
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA																															
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPd PD TAHUN BERIKUTNYA																															
							NON URUSAN																			SATPOLPP					
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			SATPOLPP					
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah																												SATPOLPP		
								SAKIP	Nilai	85.5			85.1																		
								IKM	Nilai	3.6			3.5																		
2		X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22,322,370,646			9,638,564,094		1,347,747,984		2,741,493,990					4,089,241,974		42.43 %		4,089,241,974		18.32 %	SATPOLPP
								Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100			100		25		25				25		25.00 %		25		25.00 %				
		X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					202,615,900			113,194,900		9,807,500		5,544,000					15,351,500		13.56 %		15,351,500		7.58 %	SATPOLPP
								Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	60			20		8		4				12		60.00 %		12		20.00 %				
		X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					34,627,000			16,125,000		4,548,500		1,056,000					5,604,500		34.76 %		5,604,500		16.19 %	SATPOLPP
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24			8		4		1				5		62.50 %		5		20.83 %				
		X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					167,988,900			97,069,900		5,259,000		4,488,000					9,747,000		10.04 %		9,747,000		5.80 %	SATPOLPP
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	36			12		4		3				7		58.33 %		7		19.44 %				
		X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19,586,312,207			8,242,804,555		1,190,310,542		2,402,528,642					3,592,839,184		43.59 %		3,592,839,184		18.34 %	SATPOLPP

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						7	8	9	I		II		III		IV		14		15		16		17							
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3				4	5		6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18		
							Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	36				12		1		2					3		25.00 %		3		8.33 %		
		X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18,930,992,207			8,012,124,555		1,151,970,542		2,345,218,642					3,497,189,184		43.65 %		3,497,189,184		18.47 %	SATPOLPP
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	660				660		138		138					276		41.82 %		276		41.82 %		
		X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				655,320,000			230,680,000		38,340,000		57,310,000					95,650,000		41.46 %		95,650,000		14.60 %	SATPOLPP
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	36				12		3		4					7		58.33 %		7		19.44 %		
		X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				462,932,000			220,615,400				134,931,100					134,931,100		61.16 %		134,931,100		29.15 %	SATPOLPP
							Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Laporan	36				12				4					4		33.33 %		4		11.11 %		
		X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				395,895,100			187,965,100				133,731,100					133,731,100		71.15 %		133,731,100		33.78 %	SATPOLPP
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	245				245				245					245		100 %		245		100 %		
		X	XX	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				37,306,400			17,056,400				1,200,000					1,200,000		7.04 %		1,200,000		3.22 %	SATPOLPP
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	6				2				1					1		50.00 %		1		16.67 %		
		X	XX	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				29,730,500			15,593,900																SATPOLPP
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	300				100																	
		X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				922,322,189			439,523,789		95,041,700		58,880,800					153,922,500		35.02 %		153,922,500		16.69 %	SATPOLPP
							Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	Laporan	36				12		1		6					7		58.33 %		7		19.44 %		
		X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor				19,136,000			9,518,000		1,447,000		2,953,000					4,400,000		46.23 %		4,400,000		22.99 %	SATPOLPP
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36				12		3		3					6		50.00 %		6		16.67 %		
		X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				167,414,000			74,407,600		31,932,100		27,995,200					59,927,300		80.54 %		59,927,300		35.80 %	SATPOLPP
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18				6		2		1					3		50.00 %		3		16.67 %		
		X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45,889,600			16,518,600		2,685,000		5,034,500					7,719,500		46.73 %		7,719,500		16.82 %	SATPOLPP
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	36				12		3		3					6		50.00 %		6		16.67 %		
		X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				140,707,000			27,682,000		2,517,800		4,333,800					6,851,600		24.75 %		6,851,600		4.87 %	SATPOLPP
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36				12		3		3					6		50.00 %		6		16.67 %		
		X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				108,245,189			49,499,189		11,354,400							11,354,400		22.94 %		11,354,400		10.49 %	SATPOLPP
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6				2		1							1		50.00 %		1		16.67 %		
		X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6,300,000			3,000,000		500,000		750,000					1,250,000		41.67 %		1,250,000		19.84 %	SATPOLPP
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12				1		1							1		100 %		1		8.33 %		
		X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				45,940,000			18,160,000		2,947,900		2,860,300					5,808,200		31.98 %		5,808,200		12.64 %	SATPOLPP
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12				4		1		1					2		50.00 %		2		16.67 %		
		X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				388,690,400			240,738,400		41,657,500		14,954,000					56,611,500		23.52 %		56,611,500		14.56 %	SATPOLPP

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						7	8	9	I		II		III		IV	14		15		16		17									
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3				4	5		6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18			
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36				12		3		3					6		50.00 %		6		16.67 %		
		X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					245,425,200			72,477,200		8,410,092		20,636,598					29,046,690		40.08 %		29,046,690		11.84 %	SATPOLPP
								Jumlah jenis jasa penunjang pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	2				2		1		1					2		100 %		2		100 %		
		X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					43,200,000			14,400,000		2,400,000		3,600,000					6,000,000		41.67 %		6,000,000		13.89 %	SATPOLPP
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36				12		3		3					6		50.00 %		6		16.67 %		
		X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					202,225,200			58,077,200		6,010,092		17,036,598					23,046,690		39.68 %		23,046,690		11.40 %	SATPOLPP
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36				12		3		4					7		58.33 %		7		19.44 %		
		X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					902,763,150			549,948,250		44,178,150		118,972,850					163,151,000		29.67 %		163,151,000		18.07 %	SATPOLPP
								Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah yang disediakan	Jenis	2				2		1		1					2		100 %		2		100 %		
		X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					841,263,150			525,648,250		44,178,150		112,632,850					156,811,000		29.83 %		156,811,000		18.64 %	SATPOLPP
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50				47		9		12					21		44.68 %		21		42.00 %		
		X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					61,500,000			24,300,000				6,340,000					6,340,000		26.09 %		6,340,000		10.31 %	SATPOLPP
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	63				57				8					8		14.04 %		8		12.70 %		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																							54.59 %	42.43 %			27.72 %	18.32 %	SATPOLPP		
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																							Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	SATPOLPP		
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM																															
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM																															
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA																															
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA																															
JUMLAH TOTAL											72,928,043,824	0	31,570,997,847	6,039,435,377	11,741,157,911	0	0	17,780,593,288			17,780,593,288										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						55.87 %	56.32 %			28.87 %	24.38 %				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I	II	III	IV							
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18

Disusun
Bojonegoro, 04 July 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BOJONEGORO
KAB. BOJONEGORO


ARIEF NANANG SUGIANTO, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19811121 200012 1 001

Tabel 2.2. Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PD TAHUN 2022
KABUPATEN BOJONEGORO

NAMA PD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOJONEGORO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s.d. 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018 s.d. 2023) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	122 dokumen	62 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	100.00%	20 dokumen	122 dokumen	100.00%
		Jumlah dokumen yang disusun	142 dokumen	62 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	100.00%			
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58 dokumen	30 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100.00%	8 dokumen	58 dokumen	100.00%
		Jumlah dokumen yang disusun	70 dokumen	30 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100.00%			
1.05.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 dokumen	10 dokumen	-	-	-	-	10 dokumen	100.00%
		Jumlah dokumen yang disusun	10 dokumen	10 dokumen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s.d. 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018 s.d. 2023) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100.00%	12 laporan	52 laporan	100.00%
		Jumlah laporan yang disusun	60 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100.00%			
1.05.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	100.00%
		Jumlah laporan yang disusun	2 laporan	2 laporan						
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.00%	12 laporan	36 laporan	100.00%
		Jumlah laporan keuangan yang disusun	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.00%			
1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	660 orang/ bulan	552 orang/ bulan	660 orang/ bulan	600 orang/ bulan	90.91%	552 orang/ bulan	552 orang/ bulan	100.00%
		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya tersedia	55 orang/ bulan	46 orang/ bulan	55 orang/ bulan	50 orang/ bulan	90.91%			
1.05.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	12 dokumen	36 dokumen	100.00%
		Jumlah honor pengelola keuangan yang tersedia	21 orang/ bulan	19 orang/ bulan	19 orang/ bulan	19 orang/ bulan	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s.d. 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018 s.d. 2023) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang Disusun Tepat Waktu	10 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100.00%	6 laporan	10 laporan	100.00%
		Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	6 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100.00%			
1.05.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	490 paket	245 paket	0 paket	0 paket	0.00%	245 paket	490 paket	100.00%
		Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	490 stel	245 stel	0 stel	0 stel	0.00%			
1.05.01.2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	2 dokumen	6 dokumen	100.00%
		Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang dilakukan	10 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100.00%			
1.05.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	80 orang	28 orang	-	-	-	52 orang	80 orang	100.00%
		Jumlah sosialisasi yang dilakukan	11 kali	1 kali	10 kali	9 kali	90.00%	-	-	-
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100.00%	4 laporan	12 laporan	100.00%
		Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s.d. 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018 s.d. 2023) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100.00%	12 paket	28 paket	100.00%
		Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang disediakan	24 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100.00%			
1.05.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 paket	33 paket	33 paket	33 paket	100.00%	6 paket	72 paket	100.00%
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	99 unit	33 unit	33 unit	33 unit	100.00%			
1.05.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	69 unit	23 paket	23 paket	23 paket	100.00%	23 paket	69 paket	100.00%
		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	69 unit	23 unit	23 unit	23 unit	100.00%			
1.05.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100.00%	12 paket	36 paket	100.00%
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	14.744 unit	7.300 unit	7.300 unit	6.570 unit	90.00%			
1.05.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100.00%	2 paket	6 paket	100.00%
		Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1.500 unit	500 unit	500 unit	500 unit	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s.d. 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018 s.d. 2023) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	1 dokumen	5 dokumen	100.00%
		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	29 unit	12 unit	12 unit	11 unit	91.67%			
1.05.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100.00%	4 laporan	12 laporan	100.00%
		Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	23 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100.00%			
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	100.00%	24 laporan	72 laporan	100.00%
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	120 kali	60 kali	60 kali	60 kali	100.00%			
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100.00%	2 jenis	2 jenis	100.00%
		Jumlah jenis jasa penunjang pemerintahan daerah yang disediakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s.d. 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018 s.d. 2023) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.00%	12 laporan	36 laporan	100.00%
		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100.00%			
1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.00%	12 laporan	36 laporan	100.00%
		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100.00%			
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100.00%	2 jenis	2 jenis	100.00%
		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah yang disediakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100.00%			
1.05.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 unit	47 unit	47 unit	47 unit	100.00%	47 unit	47 unit	100.00%
		Jumlah jasa yang disediakan	140 kali	64 kali	64 kali	64 kali	100.00%			

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s.d. 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018 s.d. 2023) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Aduan Gangguan Trantibum yang Ditangani	12.400 aduan	4.727 aduan	4.000 aduan	4.766 aduan	119.15%	4.200 aduan	14.821 aduan	119.52%
		2. Jumlah Lembaga Mitra Kerjasama Satpol PP	15 lembaga	13 lembaga	13 lembaga	13 lembaga	100.00%	14 lembaga	14 lembaga	100.00%
		3. Jumlah Anggota Satlinmas yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan	1.677 orang	723 orang	524 orang	524 orang	100.00%	430 orang	1.677 orang	100.00%
		4. Jumlah Anggota Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar dan Pembinaan Fisik dan Mental	245 orang	214 orang	230 orang	115 orang	50.00%	236 orang	130 orang	53.06%
1.05.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.160 kasus	720 kasus	720 kasus	720 kasus	100.00%	720 kasus	2.160 kasus	100.00%
		Jumlah patroli siaga trantibum yang dilakukan	2.190 kali	730 kali	730 kali	730 kali	100.00%			
1.05.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1.080 kasus	360 kasus	360 kasus	360 kasus	100.00%	360 kasus	1.080 kasus	100.00%
		Jumlah penindakan dan penertiban gangguan trantibum yang dilakukan	1.095 kali	365 kali	365 kali	365 kali	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s.d. 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018 s.d. 2023) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	4 dokumen	11 dokumen	91.67%
		Jumlah koordinasi yang dilakukan	21 kali	17 kali	2 kali	2 kali	100.00%			
1.05.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100.00%	5 dokumen	14 dokumen	93.33%
		Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan	17 kali	9 kali	5 kali	5 kali	100.00%			
1.05.02.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa HAM	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	780 orang	175 orang	175 orang	175 orang	100.00%	430 orang	780 orang	100.00%
		Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP dan Satlinmas	34 kali	20 kali	7 kali	7 kali	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s.d. 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018 s.d. 2023) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.02.2.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	60 dokumen	12 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	100.00%	24 dokumen	60 dokumen	100.00%
		Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan yang dilakukan	60 kali	12 kali	24 kali	24 kali	100.00%			
1.05.02.2.01.07	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	95 unit	80 unit	90 unit	90 unit	100.00%	95 unit	95 unit	100.00%
		Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	95 unit	80 unit	90 unit	90 unit	100.00%			
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan perda Kabupaten/ Kota dan peraturan Bupati/ Walikota	1. Jumlah Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dilakukan	57 kali	29 kali	14 kali	14 kali	100.00%	14 kali	55 kali	96.49%
		2. Jumlah Perda/Perkada yang Ditegakkan	49 buah	47 buah	47 buah	47 buah	100.00%	48 buah	48 buah	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s.d. 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018 s.d. 2023) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	13 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100.00%	7 laporan	12 laporan	92.31%
		Jumlah sosialisasi yang dilakukan	7 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100.00%			
1.05.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	72 laporan	24 laporan	12 laporan	9 laporan	75.00%	36 laporan	69 laporan	95.83%
		Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap perda/ perkada yang dilakukan	36 kali	24 kali	12 kali	9 kali	75.00%			
1.05.02.2.02.03	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	60 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100.00%	12 laporan	60 laporan	100.00%
		Jumlah penanganan pelanggaran perda/ perkada yang dilakukan	1.025 kali	900 kali	65 kali	65 kali	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s.d. 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (s.d. Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018 s.d. 2023) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah PPNS yang dikembangkan kapasitasnya	16 orang	15 orang	16 orang	15 orang	93.75%	16 orang	11 orang	68.75%
1.05.02.2.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00%	1 laporan	3 laporan	100.00%
		Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas PPNS yang dilakukan	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100.00%			

Note : - Arsiran Abu-Abu merupakan Indikator Lama dan belum disesuaikan dengan Indikator Sub Kegiatan yang ada pada Kepmendagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021

Bojonegoro, 31 Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOJONEGORO


ARIEF NANANG SUGIANTO, S.STP, MM.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19811121 200012 1 001

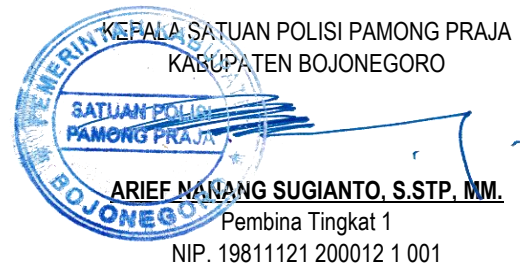
Tabel 2.3. T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bojonegoro

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pada saat pelaksanaan penertiban, anggota Satpol PP bersikap persuasif dan humanis sehingga tidak terjadi kerusakan/ kerugian baik fisik maupun materi
2	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		IKK Outcome 1	95%	97%	100%	100%	95.76%	99.77%	100%	100%	
	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab./ Kota yang ditangani		IKK Output 1.1	1.500 aduan	4.000 aduan	4.200 aduan	4.300 aduan	1.038 aduan	4.766 aduan	5.328 aduan	4.300 aduan	
	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		IKK Output 1.2	988 orang	1.275 orang	1.750 orang	2.400 orang	988 orang	1.275 orang	1.750 orang	2.400 orang	
	Jumlah perda dan perkara yang ditegakkan		IKK Output 1.3	47 peraturan	48 peraturan	48 peraturan	48 peraturan	47 peraturan	48 peraturan	30 peraturan	30 peraturan	
	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		IKK Output 1.4	15 orang	16 orang	16 orang	16 orang	8 orang	8 orang	11 orang	11 orang	

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tersedianya SOP dalam penegakan perda dan perkada serta penanganan gangguan trantibum		IKK Output 1.5	32 SOP	65 SOP	65 SOP	68 SOP	32 SOP	65 SOP	65 SOP	65 SOP	
	Tersedianya sarana prasarana minimal		IKK Output 1.6	80 unit	90 unit	95 unit	134 unit	80 unit	90 unit	95 unit	134 unit	
3	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan		IKK Outcome 2	85%	100%	100%	100%	85%	100%	100%	100%	

Bojonegoro, 31 Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOJONEGORO



ARIEF NANANG SUGIANTO, S.STP, MM.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19811121 200012 1 001

Tabel 2.4. Tabel T-C.31
Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	10	11	12
P1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9,072,659,367.00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9,072,659,367.00	
K1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	20 dokumen	109,504,900.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	20 dokumen	109,504,900.00	
SK1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	16,125,000.00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	16,125,000.00	
SK2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	93,379,900.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	93,379,900.00	
K2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	12 laporan	7,075,674,078.00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	12 laporan	7,075,674,078.00	
SK3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	552 orang/ bulan	6,844,994,078.00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	552 orang/ bulan	6,844,994,078.00	
SK4	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	230,680,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	230,680,000.00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	10	11	12
K3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang Disusun Tepat Waktu	12 laporan	228,855,400.00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang Disusun Tepat Waktu	12 laporan	228,855,400.00	
SK5	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	245 paket	187,965,100.00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	245 paket	187,965,100.00	
SK6	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14 dokumen	17,056,400.00	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14 dokumen	17,056,400.00	
SK7	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	50 orang	23,833,900.00	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	50 orang	23,833,900.00	
K4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	12 laporan	968,999,539.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	12 laporan	968,999,539.00	
SK8	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	9,518,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	9,518,000.00	
SK9	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	573,263,350.00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	573,263,350.00	
SK10	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	16,518,600.00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	16,518,600.00	
SK11	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	27,682,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	27,682,000.00	
SK12	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	49,499,189.00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	49,499,189.00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	10	11	12
SK13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	1 dokumen	3,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	1 dokumen	3,000,000.00	
SK14	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 laporan	18,160,000.00	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 laporan	18,160,000.00	
SK15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	271,358,400.00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	271,358,400.00	
K5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	2 jenis	72,477,200.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	2 jenis	72,477,200.00	
SK16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	14,400,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	14,400,000.00	
SK17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	58,077,200.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	58,077,200.00	
K6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	2 jenis	617,148,250.00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	2 jenis	617,148,250.00	
SK18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 unit	592,848,250.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 unit	592,848,250.00	
SK19	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 unit	24,300,000.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 unit	24,300,000.00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	10	11	12
P2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Bojonegoro			21,116,008,003.00	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Bojonegoro			21,116,008,003.00	
		Kabupaten Bojonegoro	1. Persentase patroli rutin terjadwal	100%			Kabupaten Bojonegoro		100%		
		Kabupaten Bojonegoro	2. Persentase patroli insidentil pencegahan pelanggaran trantibum di luar titik patroli rutin	100%			Kabupaten Bojonegoro		100%		
		Kabupaten Bojonegoro	3. Persentase kegiatan deteksi dini dan cegah dini	100%			Kabupaten Bojonegoro		100%		
		Kabupaten Bojonegoro	4. Persentase penanganan gangguan trantibum	100%			Kabupaten Bojonegoro		100%		
		Kabupaten Bojonegoro	5. Persentase penegakan perda/perkada	100%			Kabupaten Bojonegoro		100%		
		Kabupaten Bojonegoro	6. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	1.73			Kabupaten Bojonegoro		1.73		
		Kabupaten Bojonegoro	7. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	103.74			Kabupaten Bojonegoro		103.74		
		Kabupaten Bojonegoro	1. Persentase Penanganan Aduan Gangguan Trantibum	100%			Kabupaten Bojonegoro	1. Persentase Penanganan Aduan Gangguan Trantibum	100%		
		Kabupaten Bojonegoro	2. Persentase Anggota Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar dan Pembinaan Penyelenggaraan Trantibum	100%			Kabupaten Bojonegoro	2. Persentase Anggota Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar dan Pembinaan Penyelenggaraan Trantibum	100%		
		Kabupaten Bojonegoro	3. Persentase Anggota Satlinmas yang Mahir	36%			Kabupaten Bojonegoro	3. Persentase Anggota Satlinmas yang Mahir	36%		
		Kabupaten Bojonegoro	4. Persentase Perda/ Perkada yang Ditegakkan	100%			Kabupaten Bojonegoro	4. Persentase Perda/ Perkada yang Ditegakkan	100%		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	10	11	12
K7	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				19,446,790,748.00	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				19,446,790,748.00	
		Kabupaten Bojonegoro	1. Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar dan pembinaan penyelenggaraan trantibum	45 Orang			Kabupaten Bojonegoro	1. Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar dan pembinaan penyelenggaraan trantibum	45 Orang		
		Kabupaten Bojonegoro	2. Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti kegiatan pemberdayaan terkait trantibum	585 Orang			Kabupaten Bojonegoro	2. Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti kegiatan pemberdayaan terkait trantibum	585 Orang		
		Kabupaten Bojonegoro	3. Jumlah lembaga mitra kerjasama Satpol PP	14 lembaga			Kabupaten Bojonegoro	3. Jumlah lembaga mitra kerjasama Satpol PP	14 lembaga		
		Kabupaten Bojonegoro	4. Jumlah patroli rutin terjadwal	1098 kali			Kabupaten Bojonegoro	4. Jumlah patroli rutin terjadwal	1098 kali		
		Kabupaten Bojonegoro	5. Jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini	366 kali			Kabupaten Bojonegoro	5. Jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini	366 kali		
		Kabupaten Bojonegoro	6. Jumlah penanganan gangguan trantibum	4300 pelanggaran			Kabupaten Bojonegoro	6. Jumlah penanganan gangguan trantibum	4300 pelanggaran		
		Kabupaten Bojonegoro	7. Jumlah penyelesaian gangguan trantibum	4000 pelanggaran			Kabupaten Bojonegoro	7. Jumlah penyelesaian gangguan trantibum	4000 pelanggaran		
		Kabupaten Bojonegoro	8. Jumlah sarana dan prasarana trantibum minimal yang dipenuhi	134 unit			Kabupaten Bojonegoro	8. Jumlah sarana dan prasarana trantibum minimal yang dipenuhi	134 unit		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Taget Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Taget Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	10	11	12
K7	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bojonegoro	1. Jumlah Aduan Gangguan Trantibum yang Ditangani	4.300 aduan			Kabupaten Bojonegoro	1. Jumlah Aduan Gangguan Trantibum yang Ditangani	4.300 aduan		
		Kabupaten Bojonegoro	2. Jumlah Lembaga Mitra Kerjasama Satpol PP	14 lembaga			Kabupaten Bojonegoro	2. Jumlah Lembaga Mitra Kerjasama Satpol PP	14 lembaga		
		Kabupaten Bojonegoro	3. Jumlah Anggota Satlinmas yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan	430 orang			Kabupaten Bojonegoro	3. Jumlah Anggota Satlinmas yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan	430 orang		
		Kabupaten Bojonegoro	4. Jumlah Anggota Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar dan Pembinaan Fisik dan Mental	236 orang			Kabupaten Bojonegoro	4. Jumlah Anggota Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar dan Pembinaan Fisik dan Mental	236 orang		
SK20	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	42,241,500.00	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	42,241,500.00	
SK21	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	4,321,621,100.00	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	4,321,621,100.00	
SK22	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	630 orang	398,601,800.00	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	630 orang	398,601,800.00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Taget Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Taget Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	10	11	12
SK23	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	14 dokumen	8,668,592,000.00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	14 dokumen	8,668,592,000.00	
SK24	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	711,838,700.00	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa HAM	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	711,838,700.00	
SK25	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 laporan	5,276,452,748.00	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 laporan	5,276,452,748.00	
SK26	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	134 unit	27,442,900.00	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	134 unit	27,442,900.00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Taget Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Taget Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	10	11	12
K8	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota				1,654,764,255.00	Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota				1,654,764,255.00	
		Kabupaten Bojonegoro	1. Jumlah sosialisasi perda/ perkara yang dilakukan	8 kali			Kabupaten Bojonegoro	1. Jumlah sosialisasi perda/ perkara yang dilakukan	8 kali		
		Kabupaten Bojonegoro	2. Jumlah perda/perkada yang ditekakkan	30 buah			Kabupaten Bojonegoro	2. Jumlah perda/perkada yang ditekakkan	30 buah		
		Kabupaten Bojonegoro	3. Jumlah kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap perda/perkada yang dilakukan	12 kali			Kabupaten Bojonegoro	3. Jumlah kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap perda/perkada yang dilakukan	12 kali		
		Kabupaten Bojonegoro	1. Jumlah Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota yang dilakukan	14 kali			Kabupaten Bojonegoro	1. Jumlah Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota yang dilakukan	14 kali		
		Kabupaten Bojonegoro	2. Jumlah Perda/ Perkada yang Ditekakkan	48 buah			Kabupaten Bojonegoro	2. Jumlah Perda/ Perkada yang Ditekakkan	48 buah		
SK27	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8 laporan	640,643,150.00	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8 laporan	640,643,150.00	
SK28	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 laporan	984,722,105.00	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 laporan	984,722,105.00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	10	11	12
SK29	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	29,399,000.00	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	29,399,000.00	
K9	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah PPNS yang dikembangkan kapasitasnya	11 orang	14,453,000.00	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah PPNS yang dikembangkan kapasitasnya	11 orang	14,453,000.00	
SK30	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	14,453,000.00	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	14,453,000.00	
TOTAL :					30,188,667,370.00	TOTAL :					30,188,667,370.00

Bojonegoro, 31 Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOJONEGORO


ARIEF NANANG SUGIANTO, S.STP, MM.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19811121 200012 1 001

Tabel 2.5. Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		N I	H I L		

Bojonegoro, 31 Juli 2024

KAPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOJONEGORO

ARIEF NANANG SUGIANTO, S.STP, MM.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19811121 200012 1 001

Tabel 3.1. Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN BOJONEGORO

NAMA PD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOJONEGORO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024 (P-RKPD 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten Bojonegoro	100%	9,072,659,367.00			100%	31,000,560,560.00
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	Kabupaten Bojonegoro	20 dokumen	109,504,900.00			20 dokumen	114,861,000.00
1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bojonegoro	8 dokumen	16,125,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		8 dokumen	16,525,000.00
1.05.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bojonegoro	12 laporan	93,379,900.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 laporan	98,336,000.00
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Kabupaten Bojonegoro	12 laporan	7,075,674,078.00			12 laporan	29,732,666,109.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024 (P-RKPD 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bojonegoro	552 orang/ bulan	6,844,994,078.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		660 orang/ bulan	29,522,546,109.00
1.05.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bojonegoro	12 dokumen	230,680,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 dokumen	210,120,000.00
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang Disusun Tepat Waktu	Kabupaten Bojonegoro	12 laporan	228,855,400.00			12 laporan	187,005,800.00
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Bojonegoro	245 paket	187,965,100.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		245 paket	152,700,000.00
1.05.01.2.05.0005	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bojonegoro	14 dokumen	17,056,400.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		14 dokumen	17,840,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024 (P-RKPD 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kabupaten Bojonegoro	50 orang	23,833,900.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		50 orang	16,465,800.00
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Kabupaten Bojonegoro	12 laporan	968,999,539.00			12 laporan	434,684,000.00
1.05.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bojonegoro	6 paket	9,518,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6 paket	9,559,000.00
1.05.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bojonegoro	12 paket	573,263,350.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 paket	80,977,800.00
1.05.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Bojonegoro	12 paket	16,518,600.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 paket	17,000,000.00
1.05.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bojonegoro	12 paket	27,682,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 paket	44,603,000.00
1.05.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Bojonegoro	2 paket	49,499,189.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 paket	51,200,000.00
1.05.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Kabupaten Bojonegoro	1 dokumen	3,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 dokumen	3,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024 (P-RKPD 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Bojonegoro	4 laporan	18,160,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 laporan	22,144,200.00
1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bojonegoro	12 laporan	271,358,400.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 laporan	206,200,000.00
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	Kabupaten Bojonegoro	2 jenis	72,477,200.00			2 jenis	85,773,632.00
1.05.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bojonegoro	12 laporan	14,400,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 laporan	14,400,000.00
1.05.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bojonegoro	12 laporan	58,077,200.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 laporan	71,373,632.00
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	Kabupaten Bojonegoro	2 jenis	617,148,250.00			2 jenis	445,570,019.00
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Bojonegoro	47 unit	592,848,250.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		47 unit	420,170,019.00
1.05.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Bojonegoro	57 unit	24,300,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		60 unit	25,400,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024 (P-RKPD 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kabupaten Bojonegoro		21,116,008,003.00				10,822,347,268.00
		1. Persentase patroli rutin terjadwal	Kabupaten Bojonegoro	100%				100%	
		2. Persentase patroli insidentil pencegahan pelanggaran trantibum di luar titik patroli rutin	Kabupaten Bojonegoro	100%				100%	
		3. Persentase kegiatan deteksi dini dan cegah dini	Kabupaten Bojonegoro	100%				100%	
		4. Persentase penanganan gangguan trantibum	Kabupaten Bojonegoro	100%				100%	
		5. Persentase penegakan perda/perkada	Kabupaten Bojonegoro	100%				100%	
		6. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	Kabupaten Bojonegoro	1.73				1.75	
		7. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	Kabupaten Bojonegoro	103.74				104.14	
		1. Persentase Penanganan Aduan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	Kabupaten Bojonegoro	100%				100%	
		2. Persentase Anggota Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar dan Pembinaan Penyelenggaraan Trantibum	Kabupaten Bojonegoro	100%				100%	
		3. Persentase Anggota Satlinmas yang Mahir	Kabupaten Bojonegoro	36%				37%	
		4. Persentase Perda/Perkada yang Ditegakkan	Kabupaten Bojonegoro	100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024 (P-RKPD 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten Bojonegoro		19,446,790,748.00				8,918,593,848.00
		1. Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar dan pembinaan penyelenggaraan trantibum	Kabupaten Bojonegoro	45 Orang				45 Orang	
		2. Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti kegiatan pemberdayaan terkait trantibum	Kabupaten Bojonegoro	585 Orang				685 Orang	
		3. Jumlah lembaga mitra kerjasama Satpol PP	Kabupaten Bojonegoro	14 lembaga				15 lembaga	
		4. Jumlah patroli rutin terjadwal	Kabupaten Bojonegoro	1098 kali				1098 kali	
		5. Jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini	Kabupaten Bojonegoro	366 kali				365 kali	
		6. Jumlah penanganan gangguan trantibum	Kabupaten Bojonegoro	4300 pelanggaran				4400 pelanggaran	
		7. Jumlah penyelesaian gangguan trantibum	Kabupaten Bojonegoro	4000 pelanggaran				4100 pelanggaran	
		8. Jumlah sarana dan prasarana trantibum minimal yang dipenuhi	Kabupaten Bojonegoro	134 unit				140 unit	
		1. Jumlah Aduan Gangguan Trantibum yang Ditangani	Kabupaten Bojonegoro	4.300 aduan				4.400 aduan	
		2. Jumlah Lembaga Mitra Kerjasama Satpol PP	Kabupaten Bojonegoro	14 lembaga				15 lembaga	
		3. Jumlah Anggota Satlinmas yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan	Kabupaten Bojonegoro	430 orang				450 orang	
		4. Jumlah Anggota Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar dan Pembinaan Fisik dan Mental	Kabupaten Bojonegoro	236 orang				238 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024 (P-RKPD 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	12 dokumen	42,241,500.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 dokumen	42,482,000.00
1.05.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Bojonegoro	12 dokumen	4,321,621,100.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 dokumen	308,435,000.00
1.05.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Bojonegoro	630 orang	398,601,800.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		730 orang	313,724,000.00
1.05.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kabupaten Bojonegoro	14 dokumen	8,668,592,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		15 dokumen	2,331,682,480.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024 (P-RKPD 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kabupaten Bojonegoro	12 laporan	711,838,700.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 laporan	645,251,000.00
1.05.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kabupaten Bojonegoro	2 laporan	5,276,452,748.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 laporan	5,250,321,368.00
1.05.02.2.01.0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kabupaten Bojonegoro	134 unit	27,442,900.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		140 unit	26,698,000.00
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1. Jumlah sosialisasi perda/perkada yang dilakukan	Kabupaten Bojonegoro	8 kali	1,654,764,255.00			8 kali	1,874,900,920.00
		2. Jumlah perda/perkada yang ditegakkan	Kabupaten Bojonegoro	30 buah				40 buah	
		3. Jumlah kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap perda/perkada yang dilakukan	Kabupaten Bojonegoro	12 kali				12 kali	
		1. Jumlah Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dilakukan	Kabupaten Bojonegoro	14 kali				14 kali	
		2. Jumlah Perda/Perkada yang Ditegakkan	Kabupaten Bojonegoro	48 buah				49 buah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024 (P-RKPD 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.05.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Bojonegoro	8 laporan	640,643,150.00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		8 laporan	1,072,346,665.00	
1.05.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Kabupaten Bojonegoro	12 laporan	984,722,105.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, DBH CHT		12 laporan	767,346,555.00	
1.05.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Bojonegoro	12 laporan	29,399,000.00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		12 laporan	35,207,700.00	
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah PPNS yang dikembangkan kapasitasnya	Kabupaten Bojonegoro	11 orang	14,453,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		13 orang	28,852,500.00	
1.05.02.2.03.0006	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kabupaten Bojonegoro	1 laporan	14,453,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 laporan	28,852,500.00	
TOTAL					30,188,667,370.00	TOTAL				41,822,907,828.00

Note : - Indikator Sub Kegiatan Tahun 2024 disesuaikan dengan Indikator Sub Kegiatan yang ada pada **Keppmendagri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023**

Bojonegoro, 31 Juli 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOJONEGORO

ARIEF NANANG SUGIANTO, S.STP, MM.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19811121 200012 1 001

**Tabel 3.2. PAGU PERUBAHAN APBD (P-APBD) TAHUN 2024 TAHAPAN RKPD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2024 (Rp.)	PAGU APBD 2024 (Rp.)	PAGU P-RKPD 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(7)
SATPOL PP			62,291,650,587	31,570,997,847	30,188,667,370	
P1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,863,609,245	9,638,564,094	9,072,659,367	
K1	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54,209,000	113,194,900	109,504,900	
SK1	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,902,000	16,125,000	16,125,000	
SK2	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43,307,000	97,069,900	93,379,900	
K2	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daaerah	6,167,472,295	8,242,804,555	7,075,674,078	
SK3	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,955,152,295	8,012,124,555	6,844,994,078	Adanya pengurangan anggaran yang bersumber dari Selisih perhitungan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 1.167.130.477 sehingga pagu awal Rp.8.012.124.555,- menjadi Rp.6.844.994.078,-
SK4	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	212,320,000	230,680,000	230,680,000	
K3	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daaerah	22,088,100	220,615,400	228,855,400	
SK5	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2,665,100	187,965,100	187,965,100	
SK6	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10,410,000	17,056,400	17,056,400	
SK7	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	9,013,000	15,593,900	23,833,900	
K4	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daaerah	330,563,600	439,523,789	968,999,539	
SK8	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9,518,000	9,518,000	9,518,000	

NO	KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2024 (Rp.)	PAGU APBD 2024 (Rp.)	PAGU P-RKPD 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(7)
SK9	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,053,000	74,407,600	573,263,350	
SK10	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,371,000	16,518,600	16,518,600	
SK11	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56,512,500	27,682,000	27,682,000	
SK12	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,737,100	49,499,189	49,499,189	
SK13	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,650,000	3,000,000	3,000,000	
SK14	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,780,000	18,160,000	18,160,000	
SK15	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182,942,000	240,738,400	271,358,400	
K5	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,094,000	72,477,200	72,477,200	
SK16	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14,400,000	14,400,000	14,400,000	
SK17	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73,694,000	58,077,200	58,077,200	
K6	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201,182,250	549,948,250	617,148,250	
SK18	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182,882,250	525,648,250	592,848,250	
SK19	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,300,000	24,300,000	24,300,000	
P2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	55,428,041,342	21,932,433,753	21,116,008,003	
K7	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	53,978,550,170	19,998,016,498	19,446,790,748	
SK20	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	45,349,500	42,241,500	42,241,500	

NO	KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2024 (Rp.)	PAGU APBD 2024 (Rp.)	PAGU P-RKPD 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(7)
SK21	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	39,247,715,200	5,106,174,200	4,321,621,100	Peralihan BKK Honor Insentif Linmas ke BPKAD sebesar Rp. 33.120.000.000,-
SK22	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	119,800,450	170,975,350	398,601,800	
SK23	1.05.02.2.01.0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8,737,032,000	8,678,592,000	8,668,592,000	
SK24	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	893,833,100	711,838,700	711,838,700	
SK25	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	4,914,121,820	5,262,352,748	5,276,452,748	
SK26	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	20,698,100	25,842,000	27,442,900	
K8	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota	1,443,831,172	1,919,964,255	1,654,764,255	
SK27	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	707,369,250	1,107,369,250	640,643,150	1. Adanya peralihan pagu DBH CHT pada Kegiatan Publikasi dari Satpol PP ke Diskominfo sebesar Rp.265.200.000,- 2. Pengalihan pengurangan pagu untuk sarpras DBH CHT ke Kegiatan Opsar BKC Ilegal dan Rakor Evaluasi DBH CHT di Bidang Penegakan Hukum sebesar Rp.201.526.100,-, sehingga pagu awal Rp.1.107.369.250,- menjadi Rp.640.643.150,-

NO	KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2024 (Rp.)	PAGU APBD 2024 (Rp.)	PAGU P-RKPD 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(7)
SK28	1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	707,062,922	783,196,005	984,722,105	Mendapat penambahan pagu dari Pengalihan pengurangan pagu untuk sarpras DBH CHT ke Kegiatan Opsar BKC Ilegal dan Rakor Evaluasi DBH CHT di Bidang Penegakan Hukum sebesar Rp.201.526.100,-, sehingga pagu awal Rp.783.196.005,- menjadi Rp.984.722.105,-
SK29	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29,399,000	29,399,000	29,399,000	
K9	1.05.02.2.03		5,660,000	14,453,000	14,453,000	
SK30	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	5,660,000	14,453,000	14,453,000	
	PAGU ANGGARAN SATPOL PP TAHUN 2024		62,291,650,587	31,570,997,847	30,188,667,370	

Bojonegoro, 31 Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOJONEGORO

ARIEF NANANG SUGIANTO, S.STP., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19811121 200012 1 001



1950